

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diketahui bahwa dana BOS dinilai sebagai salah satu program yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah yang mampu dipakai guna membantu dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan dan juga mendukung kegiatan yang diikuti di lingkungan sekolah atau memiliki tujuan sebagai sumber pendanaan kegiatan operasional dalam bidang aspek nonpersonalia yang ada di lingkungan sekolah. Program pemberian dana BOS ini telah diketahui secara langsung dikomandani oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimana dalam melakukan kegiatan proses pelaksanaan, kegiatan proses penyaluran dan juga kegiatan proses pengelolaannya dengan keharusan wajib untuk memakai segala pedoman yang ada di dalam buku petunjuk teknis penggunaan sejumlah dana BOS yang telah dilakukan penerbitan secara langsung oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimana hal ini wajib untuk dipatuhi dengan baik (Mulyono, 2016).

Dana BOS ini diketahui telah dilakukan proses penyaluran oleh pihak pemerintah kepada masing-masing sekolah guna agar mampu dilakukan pengelolaan atas penerimaan dan juga atas pengeluarannya yang dimana begitu sangat diharapkan agar mampu sejumlah dana ini memenuhi segala kebutuhan yang ada dalam melaksanakan kegiatan operasional sekolah. Dimana selanjutnya pihak sekolah sebagai pihak penerima sejumlah dana BOS ini dengan

kewajibannya atau dituntut agar mampu melakukan proses perencanaan, melakukan proses pelaksanaan, melakukan proses evaluasi serta mampu dengan secara penuh melakukan proses pertanggungjawaban.

Pada saat diperhatikan dari aspek akuntansi, maka diketahui kepala sekolah dianggap memiliki kewajiban guna menampilkan dan juga menyampaikan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak sekolah kepada para pihak *stakeholders*, dimana laporan ini membahas hal-hal terutama tentang jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran yang diterima dan dipakai oleh pihak sekolah. Selain itu dalam hal ini pihak sekolah wajib melakukan bentuk pertanggungjawaban dengan memberikan dan juga menampilkan informasi yang mencakup tentang data hasil kinerjanya baik data hasil kinerja keuangan maupun data hasil kinerja programnya yang telah direalisasikan. Dengan demikian, maka pada saat memberikan dan juga menampilkan informasi, tentunya pihak sekolah wajib agar bisa memperhatikan secara baik segala macam kebutuhan para pihak *stakeholders* yang dimana mencakup pihak pemerintah dan juga partisipasi yang dari kalangan masyarakat guna menciptakan akuntabilitas .

Akuntabilitas mengacu ungkapan dari (Minarti, 2011) bahwa dinilai sebagai bentuk adanya tanggung jawab yang dilakukan guna untuk memberikan penjelasan pada sikap ataupun tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak sekolah dalam melakukan kegiatan pengelolaan sejumlah anggaran dan juga pada segala kegiatan yang adanya hubungan kaitannya kepada para pihak yang memiliki kepentingan. Selain itu akuntabilitas juga dinilai sebagai adanya bentuk kewajiban yang dilakukan guna agar mampu adanya bentuk pertanggungjawaban

yang dilakukan guna memberikan jawaban atau dalam bentuk keterangan pada hasil kinerja dan juga tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan yang dimana hal ini disampaikan pada para pihak yang di dalamnya mempunyai hak dan juga kewajiban guna meminta sebuah penjelasan atau keterangan atau bentuk pertanggungjawaban(Lembaga Instansi Negara (LAN), 2004).

Mengacu pada pendapat diatas, maka diketahui bahwa akuntabilitas dinilai sebagai adanya bentuk pertanggungjawaban yang wajib dalam hal ini diberikan penjelasan pada pihak pemangku kepentingan yang membahas hal-hal yang ada kaitannya tentang tindakan apa saja yang telah dilaksanakan oleh sekolah dalam mempergunakan atau memanfaatkan sejumlah anggaran dan juga melaksanakan berbagai macam kegiatan sekolah.

Riset yang telah berhasil diadakan secara langsung oleh (Pujiati, 2017) menemukan bahwa, (1) variabel pengelolaan BOS memberikan pembutian adanya hasil pengaruhnya yang arahnya secara positif pada variabel akuntabilitas keuangan BOS, (2) juga temukan aksesibilitas laporan BOS memberikan pembutian adanya hasil pengaruhnya yang arahnya secara positif pada akuntabilitas keuangan BOS, sehingga memberikan makna bahwa pada kondisi semakin adanya kemudahan melakukan akses atas laporan keuangan yang ingin diketahui, maka dengan secara otomatis akan semakin tinggi juga tingkat akuntabilitas keuangan BOS, dan (3) variabel akuntabilitas keuangan BOS berpengaruh positif terhadap variabel persepsi Stakeholders. Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa Pengelolaan Dana BOS dan Aksebilitas Keuangan BOS dijadikan sebagai indikator dalam menilai Akuntabilitas Keuangan BOS.

(Mulyono, 2016) memberikan penjelasan terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang dimana dinilai menjadi serangkaian dari proses kegiatan yang telah sebelumnya adanya melakukan perencanaan dan juga kegiatan ini dilakukan atau diupayakan dengan adanya bentuk kesengajaan dengan penuh kesungguhan, serta dalam melakukan kegiatan ini adanya pembinaan yang bersifat secara kontinu yang arahnya pada biaya-biaya operasional yang terjadi di sekolah, sehingga segala kegiatan yang menyangkut pendidikan mampu untuk dilakukan dengan secara lebih efektif dan juga lebih efisien serta mampu memberikan bantuan dan juga dukungan dalam mewujudkan misi atau tujuan pendidikan.

Selain itu mampu dipahami pula bahwa melakukan pengelolaan keuangan yang ada di sekolah dinilai menjadi serangkaian proses kegiatan yang pastinya mencakup adanya tahapan melakukan proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan juga wajib adanya proses pengawasan guna agar mampu dengan lancar mewujudkan misi atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang selanjutnya pada saat sudah direalisasikan wajib melakukan bentuk pertanggungjawaban pada pihak pemerintah dan juga pada kalangan masyarakat luas.

Selanjutnya dipahami bahwa aksesibilitas laporan BOS dinilai sebagai adanya kemudahan yang diperoleh oleh setiap orang guna mendapatkan segala informasi yang dimana mencakup informasi yang ada kaitannya mengenai laporan keuangan (Mulyasa, 2014). Selain itu aksesibilitas laporan keuangan mampu dibuktikan adanya muncul efek pengaruh yang mengarah pada akuntabilitas

pengelolaan keuangan. Dengan demikian, maka pada saat tampak tingginya tingkat aksesibilitas yang ada pada laporan keuangan tersebut, maka dengan secara otomatis pada umumnya akuntabilitas pengelolaan keuangan akan mampu dengan mudahnya diwujudkan, sebaliknya pada saat tampak rendah tingkat aksesibilitas yang ada pada laporan keuangan tersebut, maka dengan secara otomatis pada umumnya akuntabilitas pengelolaan keuangan akan dinilai kurang tampak transparan (Superdi, 2017) .

Akuntabilitas dinilai menjadi hal yang begitu sangat penting untuk diperhatikan sebab hal ini yang mampu mendorong secara kuat terwujudnya bentuk tanggung jawab guna agar adanya peningkatan kinerja yang mampu dihasilkan oleh masing-masing sekolah. Akuntabilitas juga dinilai sebagai aspek atau prinsip yang wajib untuk diusahakan atau diupayakan dengan maksimal guna diimplementasikan oleh masing-masing pihak sekolah yang dimana sebagai pihak yang memiliki peran yang sangat esensial dalam kehidupan ini ialah sebagai penyelenggara pendidikan. Dengan melakukan pengimplementasian prinsip ini maka secara otomatis akan mampu memunculkan adanya pengaruh pada hal-hal efek positif pada seluruh publik dan juga pada para pihak yang adanya kaitan dalam kondisi ini (*stakeholders*). Sehingga pada kondisi ini akan adanya cara pandang atau persepsi yang direspon oleh publik dan juga pada para pihak yang adanya kaitan dalam kondisi ini (*stakeholders*) ialah bahwa sekolah dinilai sebagai lembaga yang melakukan kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara yang bersih dan juga secara berwibawa (Pujiati, 2017). Mengacu pada UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, maka hal ini ada secara

khususnya di dalam Pasal 56 yang memberikan penjelasan bahwa para pihak stakeholders yang ada di dalam lembaga pendidikan mencakup adanya kalangan masyarakat, pihak dewan Pendidikan dan juga pihak komite sekolah.

Mengacu pada ungkapan (Nurindah, 2020), maka menjelaskan terkait sebagai adanya konsekuensi yang dimana mengakomodasi segala bentuk aspirasi, kehendak atau harapan dan juga kebutuhan yang ada pada *stakeholders* sekolah, maka dalam kondisi ini begitu sangat diperlukan adanya tempat sebagai media guna dipakai menampung dan juga dipakai menyalurkan segala masukan atau saran-saran yang membangun ke arah yang positif. Media yang disiapkan ini memiliki fungsi guna dipakai sebagai forum dimana melakukan representasi oleh para pihak *stakeholders* sekolah yang mampu terwakili dengan secara proporsional. Diketahui bahwa mengacu pada berbagai dokumen yang tersedia dan juga didukung oleh konsensus yang telah tampak ada di dalam berbagai forum, maka media yang dimaksud dalam hal ini telah diberi nama ialah “komite sekolah”. Sementara badan sejenis yang memiliki peran fungsi yang sama ini diketahui di negara Australia disebut sebagai *school council* (Chan, 1997)

Pada saat melakukan pelaksanaannya, maka diketahui bahwa masih begitu banyaknya muncul atau terjadinya persoalan atau permasalahan yang adanya hubungan dengan pengelolaan sejumlah dana BOS. Diketahui hal ini tampak terlihat mulai dari melakukan proses penyusunan anggaran, cara pemakaian yang juga hal ini mengarah sampai dengan pelaporan yang dilakukan sebagai bentuk adanya pertanggungjawaban memakai sejumlah BOS. Para pihak manajemen sekolah dinilai masih memiliki kekurangan dalam

mengimplementasikan prinsip transparan dalam melakukan proses pengelolaan sejumlah dana BOS ini, sehingga memunculkan adanya kasus atau kejadian penyelewengan pada dana ini mulai dari adanya masalah ditemukan pada saat dialokasikan dengan tanpa berlandaskan pada kebutuhan yang benar-benar ada di sekolah namun arahnya pada ketersediaan anggaran, adanya kasus atau kejadian penyalahgunaan keuangan yang dipakai untuk menjadikan pihak yang terlibat menjadi kaya seta melakukan kasus memanipulasi pelaporan ini guna mencari keuntungan semata(Sine, 2021) . Dalam kondisi ini telah tampak akan lemahnya keterlibatan atau bentuk partisipasi dan juga pengawasan yang dilakukan oleh para pihak komite sekolah yang dimana hal ini terjadi disebabkan oleh sejumlah faktor dimana kurang memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang memadai dalam mendukung atau mendorong terciptanya transparansi pada anggaran yang ada di sekolah.

Diketahui bahwa pada tahun 2022 proses melakukan pencairan dana BOS dilakukan dengan memakai acuan 3 Tahap. Waktu yang dipergunakan dalam melakukan proses penyaluran sejumlah dana BOS ini ialah dilakukan pada tiap-tiap triwulan, ialah (1) Januari-Maret, (2) April- Juni, Juli-September dan (3) Oktober-Desember. Proses melakukan pencairan dana BOS selanjutnya, akan dilakukan pasca triwulan pertama yang dalam hal ini diselaraskan dengan peraturan pemerintah No. 008 tahun 2020. Diketahui bahwa bagi daerah wilayah yang posisinya secara geografis yang dimana dinilai sangat sulit untuk dijangkau, maka dalam melakukan proses pengambilan dana BOS ini dinilai menemukan rintangan yang menjadi hambatan atau dalam kata lain membutuhkan adanya biaya-biaya

yang dipakai pada saat pengambilan yang menjadi lebih mahal, maka atas masukan atau solusi yang diberikan oleh pihak pemerintah yang ada di kawasan daerah dan juga atas adanya persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dalam melakukan proses penyaluran sejumlah dana BOS ini akan dilakukan dengan memakai waktu tiap-tiap semester ialah dari bulan Januari-Juni dan juga bulan Juli-Desember.

Pada lokasi penelitian, penyaluran dana BOS sering mengalami permasalahan dalam hal keterlambatan transfer/ penerimaan dana BOS ke pihak sekolah. Mengacu hasil wawancara awal yang pihak peneliti lakukan kepada beberapa Bendahara BOS SMK Negeri yang ada di Singaraja pencairan tahap pertama paling cepat terjadi pada Bulan Maret. Sedangkan kebutuhan Sekolah Menengah Kejuruan di bulan Januari sampai dengan Maret sangat besar yaitu mencapai 30% dari keseluruhan anggaran, mengingat pada rentangan bulan ini siswa kelas XII melakukan rangkaian ujian dari Ujian Sekolah sampai dengan Uji Kompetensi Kejuruan yang memerlukan pendanaan yang sangat besar. Hal ini dinilai memunculkan masalah atau kendala bagi pihak sekolah sebab akan menjadi akibat munculnya gangguan pada saat melakukan proses pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di lingkungan sekolah, padahal sebetulnya kegiatan belajar dan mengajar sangat dituntut wajib untuk terlaksana, namun pada saat melihat sisi lain bahwa dana yang dipakai melakukan kegiatan operasioan di sekolah belum mampu tersedia.

Dengan demikian, maka masalah ini sering kali dinilai oleh pihak sekolah sebagai hal yang membut pihak sekolah kebingungan dan merasa resah

sebab pihak sekolah wajib untuk melakukan segala upaya usaha mencari sejumlah dana guna mendukung kegiatan belajar dan mengajar agar tetap berjalan dengan semestinya dan juga lancar. Dengan adanya masalah ini, maka pihak sekolah kebanyakan yang mengambil alternatif dengan cara berutang dulu agar bisa membayar segala kebutuhan sekolahnya dan kegiatan operasional sekolah tetap terlaksana dan tanpa mengganggu proses kegiatan belajar dan mengajar (Tinggogoy, 2019).

Keterlambatan penyaluran dana BOS memberikan dampak serius terhadap pertanggungjawaban yang tepat waktu dan akurat dalam laporan keuangan sekolah. Adanya keterlambatan penyaluran dana BOS menyebabkan keterbatasan sumber daya, mempersulit sekolah untuk melaksanakan pembayaran rutin seperti gaji pegawai, pembelian kebutuhan belajar mengajar, atau pemeliharaan fasilitas pada awal tahun ajaran (Tinggogoy, 2019). Keterlambatan pencatatan dan pelaporan keuangan menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi aktual pada waktu tertentu. Keterlambatan ini tidak hanya meningkatkan risiko kesalahan dalam laporan keuangan, tetapi juga menyulitkan perencanaan anggaran. Tanpa pengetahuan pasti kapan dana akan diterima, sekolah menghadapi kesulitan dalam menentukan alokasi dana dengan efektif, terutama jika terdapat prioritas keuangan mendesak yang tidak dapat ditangani akibat ketidakpastian penyaluran dana. Oleh karena itu, meskipun upaya maksimal dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, kondisi keterlambatan dana BOS tetap menjadi hambatan yang signifikan dalam memastikan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu dan akurat.

Berdasarkan hal di atas, maka pihak penulis tertarik melakukan penelitian Pengaruh Pengelolaan BOS dan Aksesibilitas Laporan BOS Terhadap Persepsi Komite Sekolah Pada SMK Negeri di Singaraja, Dengan Akuntabilitas Keuangan BOS Sebagai Variabel Mediasi.

Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut yaitu berdasarkan pertimbangan mendasar terkait perbedaan alokasi anggaran dari pemerintah. SMK Negeri, sebagai lembaga pendidikan publik, cenderung mendapatkan dukungan keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan SMK Swasta. Hal ini dapat mempengaruhi skala dan kompleksitas pengelolaan dana BOS, serta keterbukaan dalam penyediaan laporan BOS. Dengan memfokuskan penelitian pada SMK Negeri di Singaraja, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara variabel pengelolaan dana BOS, aksesibilitas laporan BOS, dan persepsi komite sekolah, dengan mempertimbangkan akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Pemilihan SMK Negeri sebagai objek penelitian memberikan kerangka yang lebih kontekstual dan relevan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan dinamika manajemen dana BOS di lingkungan pendidikan kejuruan.

Kebaruan penelitian ini adalah dengan memanfaatkan persepsi Komite Sekolah sebagai variabel mediasi, untuk melihat Pengaruh Pengelolaan BOS terhadap Persepsi Komite dan pengaruh Aksesibilitas Keuangan terhadap Persepsi Komite Sekolah. Menurut hemat penulis, persepsi *stakeholders* yaitu komite sekolah sangat diperlukan demi perbaikan pengelolaan keuangan sekolah (Riadi, 2020).

1.2 Motivasi Penelitian

Adapun yang memotivasi penelitian ini yaitu, *pertama*, pada pelaksanaannya, masih banyak isu muncul atau terjadinya persoalan atau permasalahan yang adanya hubungan dengan pengelolaan sejumlah dana BOS. Diketahui hal ini tampak terlihat mulai dari melakukan proses penyusunan anggaran, cara pemakaian yang juga hal ini mengarah sampai dengan pelaporan yang dilakukan sebagai bentuk adanya pertanggungjawaban memakai sejumlah BOS. Para pihak manajemen sekolah dinilai masih memiliki kekurangan dalam mengimplementasikan prinsip transparan dalam melakukan proses pengelolaan sejumlah dana BOS ini, sehingga memunculkan adanya kasus atau kejadian penyelewengan pada dana ini mulai dari adanya masalah ditemukan pada saat dialokasikan dengan tanpa berlandaskan pada kebutuhan yang benar-benar ada di sekolah namun arahnya pada ketersediaan anggaran, adanya kasus atau kejadian penyalahgunaan keuangan yang dipakai untuk menjadikan pihak yang terlibat menjadi kaya seta melakukan kasus memanipulasi pelaporan ini guna mencari keuntungan semata.

Kedua, Pada lokasi penelitian, penyaluran dana BOS terjadi permasalahan dalam hal keterlambatan transfer/ penerimaan dana BOS ke pihak sekolah yang mempengaruhi pertanggungjawaban dana BOS yang dilaksanakan oleh pihak sekolah.

1.3 Rumusan Masalah

Akuntabilitas BOS dapat menjadi salah satu tolak ukur membangun persepsi *stakeholders* terhadap pengelolaan BOS. Semakin tinggi akuntabilitas yang diberikan maka akan semakin baik pula persepsi *stakeholders* akan pengelolaan BOS yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah. Kemudahan akses dalam memperoleh semua informasi yang dibutuhkan terkait laporan pertanggungjawaban dapat mendukung terciptanya akuntabilitas dan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan BOS berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan BOS pada SMK Negeri di Singaraja?
2. Apakah aksesibilitas laporan BOS berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan BOS pada SMK Negeri di Singaraja?
3. Apakah akuntabilitas keuangan BOS berpengaruh terhadap persepsi komite sekolah pada SMK Negeri di Singaraja?
4. Apakah akuntabilitas keuangan BOS memediasi pengaruh pengelolaan BOS terhadap persepsi komite sekolah pada SMK Negeri di Singaraja?
5. Apakah akuntabilitas keuangan BOS memediasi pengaruh aksesibilitas laporan BOS terhadap persepsi komite sekolah pada SMK Negeri di Singaraja?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengelolaan BOS terhadap akuntabilitas keuangan BOS pada SMK Negeri di Singaraja.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh aksesibilitas laporan BOS terhadap akuntabilitas keuangan BOS pada SMK Negeri di Singaraja.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas keuangan BOS terhadap persepsi komite sekolah pada SMK Negeri di Singaraja.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah akuntabilitas keuangan BOS memediasi pengaruh pengelolaan BOS terhadap persepsi komite sekolah pada SMK Negeri di Singaraja.
5. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah akuntabilitas keuangan BOS memediasi pengaruh aksesibilitas laporan BOS terhadap persepsi komite sekolah pada SMK Negeri di Singaraja

1.5 Kontribusi Penelitian

1.5.1 Kontribusi Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan data tambahan bagi peneliti-peneliti yang tertarik di bidang akuntansi pemerintahan, terutama berkaitan dengan akuntabilitas BOS serta implikasinya terhadap persepsi komite sekolah.
2. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur dan teori *Stakeholders* dalam konteks akuntansi sektor publik. Penelitian ini mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS, menganalisis dampak praktik akuntansi pemerintahan terhadap hubungan *stakeholders*, serta menjelaskan kaitan antara akuntabilitas keuangan dan kepercayaan mereka. Eksplorasi peran akuntansi dalam membangun kepercayaan dan menjelaskan dampak praktik akuntansi pemerintahan terhadap keterlibatan *stakeholders* juga menjadi fokus utama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur teori *Stakeholders*, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas peran dan interaksi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS di sektor publik.

1.5.2 Kontribusi Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini sangat kontributif bagi pihak sekolah, khususnya tim manajemen BOS, melalui hasil penelitian ini sekolah dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam untuk mempermudah pihak sekolah dalam memaksimalkan penggunaan alokasi

BOS secara optimal. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan sumbangan penting dengan menekankan urgensi publikasi laporan pertanggungjawaban pihak sekolah kepada stakeholders melalui media yang mudah dijangkau. Dengan membuka akses yang lebih mudah terhadap informasi pengelolaan BOS, penelitian ini memberikan kontribusi berarti dalam memberikan peluang bagi komite sekolah untuk secara aktif melakukan pengawasan. Selain itu, upaya ini juga dapat meminimalisir potensi kecurangan, menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, dan memperkuat kepercayaan antara sekolah dan seluruh pihak terkait di komunitas pendidikan.

1.5.3 Kontribusi Kebijakan

Bagi pemerintah provinsi, hasil temuan ini mampu memberikan bantuan dalam melakukan proses analisis terkait aspek faktor-faktor yang dinilai dapat mempengaruhi aspek akuntabilitas pengelolaan dana BOS, sehingga pemerintah daerah melalui dinas/instansi terkait dapat merumuskan kebijakan prihal batas maksimal alokasi dana di setiap komponen rincian belanja barang dan jasa sehingga dapat diawasi tingkat kewajarannya. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir potensi kecurangan dalam pengelolaan dana, sekaligus mempermudah pihak sekolah dalam mengalokasikan dana BOS pada komponen-komponen yang secara maksimal dapat mengakomodir kebutuhan siswa. Proses ini akan dilakukan sesuai dengan skala prioritas siswa di tiap-tiap sekolah, dengan harapan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh wali murid. Dengan demikian, penerapan kebijakan ini diharapkan mampu memberikan

dampak positif yang lebih signifikan bagi para wali murid yang secara langsung terlibat dalam program BOS

1.6 Rencana Publikasi

Penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) Sinta2.

